

Analisis Hubungan Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan di Indonesia

Yoza Adelia Khairan¹, Muhammad Irfan²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia.

*Korespondensi: yozaadelia19@gmail.com, irfan.muhammad@fe.unp.ac.id

Info Artikel

Diterima:

1 September 2026

Disetujui:

15 September 2026

Terbit daring:

27 September 2026

DOI: -

Sitasi:

Khairan, Y.A & Irfan, M. (2026). Analisis Hubungan Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan di Indonesia.

Abstract:

This study aims to analyze relationship between expenditure side fiscal decentralization and sustainable regional development across 38 provinces in Indonesia in 2014, 2019, and 2024. Sustainable regional development is measured using the Regional Sustainable Development Index (RSDI), which include economic, social, and environmental pillars aggregated using the geometric mean. This study uses secondary data from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) of Ministry Of Finance, Statistic Indonesia (BPS), and the Ministry Of Environment and Forestry (KLHK). The analysis uses Spearman's rank correlation because the data are not normally distributed based on the Shapiro-wilk test. The result show that expenditure side fiscal decentralization is not significant relationship with the economic pillars, social pillars, or RSDI across all observation periods. A consistently significant negative relationship is found between expenditure side fiscal decentralization and the environmental pillar. These finding demonstrates the existence of an ecological trade-off in the implementation of regional autonomy. The findings emphasize the importance of implementing environmentally oriented budgeting and regional fiscal transfer incentive schemes to reduce the risk of environmental degradation resulting from development expansion.

Keywords: *fiscal decentralization, sustainable development, RSDI, environmental quality, regional autonomy.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara desentralisasi fiskal sisi pengeluaran dan pembangunan wilayah berkelanjutan pada 38 provinsi di Indonesia selama 2014, 2019, dan 2024. Pembangunan wilayah berkelanjutan diukur menggunakan *Regional Sustainable Development Index* (RSDI) yang mencakup pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan yang di agregasikan dengan rata-rata geometrik. Penelitian menggunakan data sekunder dari DJPK Kemenkeu, BPS dan KLHK, analisis dilakukan menggunakan korelasi *rank spearman* karena data tidak berdistribusi normal berdasarkan uji shapiro-wilk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal sisi pengeluaran tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pilar ekonomi, pilar sosial, maupun RSDI pada seluruh periode pengamatan. Hubungan negatif signifikan secara konsisten ditemukan antara desentralisasi fiskal sisi pengeluaran dengan pilar lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa adanya fenomena trade-off ekologis dalam pelaksanaan otonomi daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan penganggaran berbasis lingkungan dan skema insentif transfer keuangan daerah untuk mengurangi resiko kerusakan lingkungan akibat ekspansi pembangunan.

Kata Kunci: desentralisasi fiskal, pembangunan berkelanjutan, RSDI, kualitas lingkungan hidup, otonomi daerah.

Kode Klasifikasi JEL: H72, E62, Q01, R58, R11

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (WCED). Secara global konsep *Triple Bottom Line* oleh Elkington menekankan keseimbangan pada ketiga aspek utama yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling berkaitan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Fauzi dan Oktavianus (2014) menekankan pembangunan

berkelanjutan perlu dilihat secara multidimensi karena perkembangan ekonomi, sosial dan lingkungan tidak selalu berjalan linier.

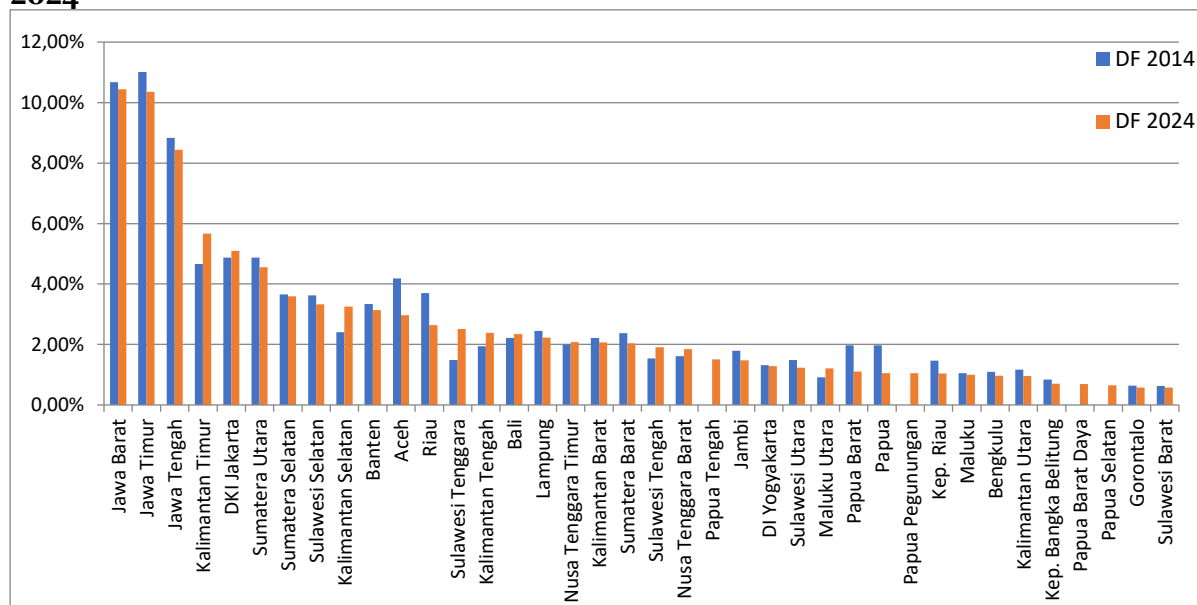
Dalam pembangunan daerah, perbedaan karakteristik dan kapasitas antar daerah adalah salah satu hal yang harus di perhatikan. Setiap daerah memiliki kondisi ekonomi, sosial, sumber daya serta kebutuhan pembangunan yang berbeda sehingga capaian pembangunan juga dapat menunjukkan perbedaan antarwilayah. Pembangunan wilayah yang berkelanjutan tidak bisa hanya di nilai dari satu indikator, beberapa dimensi pembangunan perlu di pertimbangkan secara bersamaan. Pendekatan ini penting untuk melihat perkembangan ekonomi suatu wilayah berjalan seiring dengan perbaikan kondisi sosial dan lingkungan.

Desentralisasi fiskal adalah salah satu aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah pada masing-masing provinsi di Indonesia untuk mengelola sumber daya dan menentukan prioritas pengeluaran sesuai dengan kebutuhan wilayah. Dalam perspektif *Fiscal Federalism*, informasi lebih baik di dapatkan oleh pemerintah daerah mengenai kebutuhan dan preferensi masyarakat lokal sehingga keputusan fiskal dapat di sesuaikan dengan karakteristik daerah (Shah, 2006). Namun kapasitas fiskal pengeluaran antar daerah tidak sama. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari porsi pengeluaran pemerintah daerah kota /kabupaten pada provinsi di Indonesia.

Perbedaan porsi belanja antardaerah menunjukan bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan dan membiayai kebutuhan pembangunan berbeda-beda. Kondisi ini menjadi penting karena desentralisasi fiskal tidak hanya tentang besarnya kewenangan yang di berikan kepada daerah, tetapi juga dengan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya fiskal yang tersedia. Martinez-Vazquez dan McNab (2003) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal berkaitan dengan efisiensi alokasi sumber daya, tetapi hasilnya bergantung pada kapasitas fiskal dan pengelolaan daerah. Perbedaan tersebut menjadi relevan jika di kaitkan dengan pembangunan berkelanjutan. Besarnya kapasitas pengeluaran daerah tidak secara otomatis menggambarkan capaian pembangunan yang sama karena penggunaan anggaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah. Sepuvela dan Martinez-Vazquez (2011) menunjukan bahwa hubungan desentralisasi fiskal dengan indikator sosial tidak seragam dan dapat berkaitan dengan kondisi kapasitas fiskal dengan capaian pembangunan berkelanjutan di masing-masing daerah.

Di Indonesia, desentralisasi fiskal terus mengalami penyesuaian kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan menekankan peningkatan kualitas belanja serta pemerataan pembangunan antardaerah. Perubahan kebijakan tersebut menunjukan bahwa pengelolaan pengeluaran daerah menjadi bagian penting dalam pencapaian tujuan pembangunan, sehingga perbedaan kapasitas pengeluaran antarwilayah perlu dilihat dalam kaitannya dengan capaian pembangunan masing-masing daerah.

Data DJPK Kementerian Keuangan menunjukan bahwa porsi desentralisasi fiskal sisi pengeluaran masih menunjukan perbedaan antarprovinsi. Perkembangan desentralisasi fiskal sisi pengeluaran antarprovinsi di Indonesia dapat dilihat pada tahun 2024, nilai terbesar ada pada wilayah Jawa Barat yang tercatat sebesar 10,44% diikuti Jawa timur 10,36% dan Jawa Tengah sebesar 8,44%, sedangkan beberapa provinsi memiliki nilai di bawah 1%. Perbandingan tahun 2014 dan 2024 juga menunjukan perubahan posisi beberapa daerah, seperti Kalimantan Timur yang meningkat dari 4,66% menjadi 5,67% dalam satu dekade terakhir.

Gambar 1. Desentralisasi Fiskal Sisi Pengeluaran provinsi di Indonesia tahun 2014 dan 2024

Sumber : DJPK Kementerian Keuangan, diolah.

Berdasarkan gambar 1, terdapat perbedaan porsi desentralisasi fiskal sisi pengeluaran antarprovinsi cukup lebar pada 2014 maupun 2024. Nilai relatif besar masih terlihat pada beberapa provinsi di Pulau Jawa, sementara provinsi lainnya memiliki nilai yang relatif kecil. Perbedaan kapasitas pengeluaran tersebut yang menjadi konteks penting dalam melihat keterkaitannya dengan capaian pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2024, jumlah provinsi juga bertambah menjadi 38 dari 34 provinsi pada tahun 2014 seiring dengan pemekaran wilayah daerah otonom baru (DOB).

Untuk menggambarkan pembangunan berkelanjutan secara lebih menyeluruh, Penelitian ini menggunakan *Regional Sustainable Development Index* (RSDI) sebagai pengukuran pembangunan berkelanjutan yang terdiri atas tiga aspek, yaitu pilar ekonomi (PE), pilar sosial (PS), dan pilar lingkungan (PL). PE terdiri atas PDRB per kapita dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), PS terdiri dari Kemiskinan, Gini Ratio, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan PL menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Penggunaan indeks komposit memungkinkan pembangunan berkelanjutan dilihat melalui beberapa dimensi secara bersamaan (Rahma et al., 2019).

Penelitian sebelumnya telah membahas keterkaitan desentralisasi fiskal dengan pembangunan pada berbagai dimensi. Martinez-Vazquez dan McNab (2003) mengkaji kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi serta efisiensi alokasi sumber daya. Sepuvela dan Martinez-Vazquez (2011) membahas keterkaitannya dengan kemiskinan dan ketimpangan yang tidak sama antardaerah. Fauzi dan Oxtavianus (2014) pada sisi pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya pendekatan multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Barbier dan Burgess (2017) juga memandang pembangunan berkelanjutan melalui keterkaitan antara berbagai dimensi pembangunan dan keseimbangannya yang perlu diperhatikan. Jin et al. (2022) menunjukkan bahwa hubungan desentralisasi fiskal dengan pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan tingkat pengeluaran pemerintah daerah. Nguyen et al. (2021) membahas mengenai keterkaitan desentralisasi fiskal dengan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan pengeluaran dan arah pembangunan yang sesuai.

Penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan desentralisasi fiskal sisi pengeluaran dengan pembangunan wilayah berkelanjutan menggunakan indeks komposit yang mencakup ekonomi, sosial, dan lingkungan masih terbatas. Sebagian penelitian lebih banyak melihat hubungan desentralisasi fiskal dengan satu indikator atau dimensi pembangunan, penggunaan RSDI memungkinkan capaian pembangunan dapat dilihat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan menghubungkan desentralisasi fiskal sisi pengeluaran dengan RSDI serta masing-masing indikatornya pada tingkat provinsi di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, hubungan desentralisasi fiskal dengan pembangunan wilayah berkelanjutan perlu dikaji lebih lanjut karena menunjukkan perbedaan kapasitas fiskal. Meskipun telah terdapat penelitian mengenai desentralisasi fiskal dan pembangunan, kajian yang menghubungkannya dengan pembangunan secara multidimensi masih terbatas. Penelitian ini menggunakan *Regional Sustainable Development Index* (RSDI) yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada desentralisasi fiskal sisi pengeluaran tingkat provinsi di Indonesia menggunakan data tahun 2014, 2019, dan 2024. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan desentralisasi fiskal sisi pengeluaran dengan pembangunan wilayah berkelanjutan di Indonesia serta hubungannya dengan masing-masing indikator pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal Dalam perspektif *Fiscal Federalism* dikatakan bahwa pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan dan preferensi masyarakat di wilayah sehingga kebijakan fiskal dapat disesuaikan dengan karakteristik lokal (Shah, 2006). Desentralisasi fiskal merupakan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya fiskal untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas pembangunan di daerah. Desentralisasi fiskal juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengalokasikan pengeluaran di daerah tidak hanya berkaitan dengan pembagian kewenangan. Martinez-Vazquez dan McNab (2003) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal berkaitan dengan efisiensi pertumbuhan ekonomi dan alokasi sumber daya, tetapi hasilnya juga bergantung pada kapasitas fiskal dan pengelolaan daerah.

Dalam penelitian ini desentralisasi fiskal dilihat dari sisi pengeluaran, melalui pengeluaran pemerintah kota/kabupaten dalam suatu provinsi terhadap total pengeluaran pemerintah daerah secara nasional. Pendekatan tersebut digunakan untuk menggambarkan kapasitas pengeluaran daerah dalam mendukung prioritas dan kebutuhan pembangunan. Dengan demikian, desentralisasi fiskal sisi pengeluaran menjadi dasar untuk melihat keterkaitannya dengan capaian pembangunan wilayah berkelanjutan.

Teori Pembangunan Berkelanjutan

Menurut konsep *Triple Bottom Line* oleh Elkington (1997) ada tiga aspek utama pembangunan berkelanjutan yaitu, ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*). Ketiga aspek tersebut saling berkaitan sehingga pembangunan perlu memperhatikan keseimbangan di antara ketiga aspek tersebut. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Todaro dan Smith (2011) menjelaskan bahwa pembangunan perlu dipandang secara lebih luas dan menyeluruh karena peningkatan pendapatan saja belum cukup untuk menggambarkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan dalam penelitian ini dipandang sebagai capaian pembangunan wilayah mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat pembangunan secara lebih menyeluruh, karena perkembangan pada satu aspek belum tentu diikuti oleh perkembangan pada aspek lainnya.

Regional Sustainable Development Index (RSDI)

Pembangunan berkelanjutan perlu diukur secara multidimensi karena tidak hanya mencakup aspek, tetapi juga pada kondisi sosial dan lingkungan. Rahma et al. (2019) mengembangkan ukuran komposit pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut sehingga memberikan gambaran pembangunan yang lebih menyeluruh. Pembangunan berkelanjutan diukur menggunakan *Regional Sustainable Development Index* (RSDI) yang terdiri dari tiga pilar yaitu pilar ekonomi (PE) yang terdiri dari PDRB perkapita dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pilar sosial (PS) terdiri dari Kemiskinan, Gini Ratio, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan pilar lingkungan (PL) yang terdiri dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

RSDI digunakan untuk menggambarkan capaian pembangunan berkelanjutan secara agregat, sedangkan masing-masing pilar digunakan untuk melihat kondisi pembangunan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpisah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan untuk mengkaji hubungan antara desentralisasi fiskal sisi pengeluaran dengan indikator pembangunan berkelanjutan pada provinsi di Indonesia tahun 2014, 2019, dan 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan korelasional teknik analisis yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif, perhitungan indeks komposit, uji prasyarat normalitas, analisis korelasi, uji signifikansi, analisis komparatif, serta analisis kuadran. Data di peroleh dari publikasi dan data resmi DJPK Kemenkeu serta BPS dan KLHK.

Tabel 1. Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Pengukuran
Desentralisasi Fiskal (DF)	Proporsi realisasi pengeluaran pemerintah kota/kabupaten terhadap total realisasi belanja daerah secara nasional. Dinyatakan dalam bentuk persen (%)	Persen
RSDI	Indeks komposit yang menggambarkan capaian pembangunan wilayah berkelanjutan secara multidimensi. Diukur menggunakan rata-rata geometrik dari PE, PS, dan PL	Indeks
Pilar Ekonomi (PE)	Dimensi pembangunan yang menggambarkan kondisi kesejahteraan dan pemerataan sosial masyarakat. Diukur dengan rata-rata geometrik dari PDRB perkapita dan TPT yang telah di normalisasikan dan disesuaikan arah indikatornya.	Indeks
Pilar Sosial (PS)	Dimensi pembangunan yang menggambarkan kondisi kesejahteraan dan pemerataan sosial masyarakat. Diukur dengan rata-rata geometrik dari Kemiskinan, Gini Ratio, dan IPM, yang telah dinormalisasi dan disesuaikan arah indikatornya.	Indeks
Pilar Lingkungan (PL)	Dimensi pembangunan yang menggambarkan kondisi lingkungan wilayah. Diukur dengan IKLH yang telah di normalisasikan.	Indeks

Sumber : DJPK Kemenkeu, BPS, dan KLHK, diolah

Penelitian ini menggunakan *Regional Sustainable Development Index* (RSDI) sebagai ukuran komposit pembangunan wilayah berkelanjutan yang terdiri atas pilar ekonomi (PE), pilar sosial (PS), dan pilar lingkungan (PL). RSDI dihitung menggunakan rumus rata-rata geometrik dari ketiga pilar tersebut dengan rumus:

Indeks Komposit RSDI :

$$RSDI = \sqrt[3]{(\sqrt{PDRB' \times TPT''}) \times (\sqrt[3]{Kemiskinan'' \times Gini'' \times Ipm'}) \times IKLH'}$$

Nilai RSDI kemudian digunakan untuk menganalisis hubungan dengan desentralisasi fiskal sisi pengeluaran menggunakan Korelasi Rank Spearman. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada hasil uji normalitas Shapiro Wilk yang menunjukkan bahwa data penelitian tidak berdistribusi normal. Pengujian hubungan dilakukan pada tingkat signifikansi 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, terdapat perbedaan perkembangan antara desentralisasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan selama periode penelitian. Pada tahun 2014 rata-rata DF sebesar 2,94% dan masih memiliki nilai yang sama pada tahun 2019, lalu menurun pada tahun 2024 menjadi 2,63%. Sebaliknya rata-rata RSDI meningkat dari 0,354 pada tahun 2014, menjadi 0,460 pada tahun 2019 dan 0,517 pada tahun 2024. Perbedaan arah tersebut menunjukkan adanya peningkatan capaian pembangunan berkelanjutan secara agregat tidak berlangsung bersamaan dengan peningkatan rata-rata DF.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Tahun 2014, 2019, dan 2024

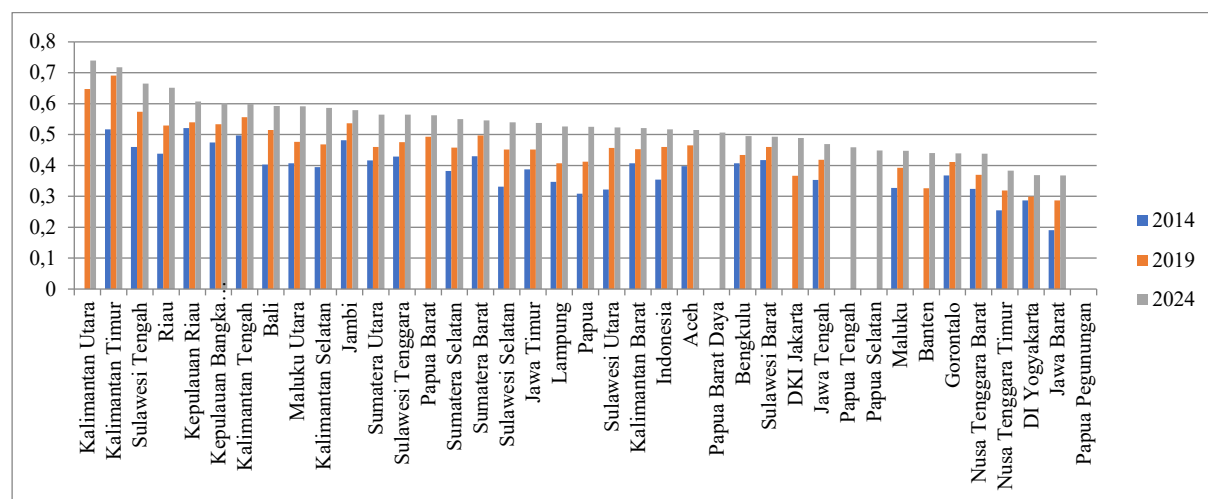
Tahun	Indikator	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
2014	DF (%)	34	2,94	2,59	0,62	11,01
	PDRB	34	36,99	29,80	10,74	136,31
	TPT (%)	33	4,65	2,43	1,37	9,87
	Kemiskinan (%)	33	12,02	6,36	3,92	30,05
	Gini Ratio	33	0,375	0,037	0,303	0,439
	IPM	34	67,98	4,16	56,75	78,39
	IKLH	33	64,54	10,88	36,88	84,51
2019	DF (%)	34	2,94	2,61	0,65	10,92
	PDRB	34	43,19	32,64	12,71	173,92
	TPT (%)	34	4,41	1,65	1,22	7,78
	Kemiskinan (%)	34	10,46	5,68	3,47	27,53
	Gini Ratio	34	0,350	0,035	0,269	0,423
	IPM	34	71,04	3,91	60,84	80,76
	IKLH	34	67,20	9,94	42,84	83,96
2024	DF (%)	38	2,63	2,46	0,58	10,44
	PDRB	38	48,48	35,40	9,38	194,85
	TPT (%)	38	4,37	1,40	1,18	7,02
	Kemiskinan (%)	38	11,15	6,75	4,00	32,97
	Gini Ratio	38	0,341	0,045	0,244	0,435
	IPM	38	73,50	5,13	54,43	84,15
	IKLH	38	75,11	5,56	56,39	83,75

Sumber: Hasil olahan data Stata 2026

Berdasarkan tabel 2, peningkatan RSDI menunjukkan bahwa perkembangan pembangunan wilayah di Indonesia secara agregat bergerak ke arah yang lebih baik selama periode pengamatan. Namun peningkatan tersebut tidak terjadi pada seluruh dimensi pembangunan. Perbedaan perkembangan antarpilar menunjukkan bahwa perbaikan capaian pembangunan masih berbeda antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kondisi ini memperlihatkan

bahwa peningkatan pembangunan tidak cukup dilihat dari salah satu dimensi saja, karena peningkatan pada satu pilar belum tentu menunjukkan kondisi yang sama pada pilar lainnya.

Gambar 2. Perkembangan RSDI Tahun 2014, 2019 dan 2024



Sumber: Hasil olahan data Stata, 2026

Berdasarkan gambar 2, perkembangan RSDI mengalami perubahan selama periode penelitian. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pembangunan berkelanjutan secara agregat, tetapi peningkatan tersebut perlu dilihat lebih lanjut. Hal ini karena RSDI merupakan indeks komposit yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga perubahan nilai agregat belum menunjukkan dimensi pembangunan mana yang lebih berperan dalam perkembangan.

Perkembangan Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Perubahan RSDI didukung oleh perkembangan pada ketiga pilarnya. Perkembangan masing-masing pilar dan indikator penyusunnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. Perkembangan Pilar Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2014, 2019, dan 2024.

Pilar	Indikator	2014	2019	2024
PE	Indeks PE	0,2333	0,3019	0,3279
	PDRB per kapita	36,997	43,192	48,487
	TPT (%)	4,647	4,411	4,368
PS	Indeks PS	0,4411	0,5625	0,5885
	Kemiskinan (%)	12,024	10,455	11,146
	Gini Ratio	0,3753	0,3504	0,3411
	IPM	67,983	71,040	73,501
PL	Indeks PL	0,5807	0,6365	0,8026
	IKLH	64,541	67,197	75,109

Sumber: Hasil olahan data Stata, 2026

Perkembangan masing-masing pilar menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak mengalami peningkatan sama dengan seluruh dimensi. Perubahan pada kondisi ekonomi tidak otomatis mencerminkan perubahan yang sama pada kondisi sosial maupun lingkungan. Pola tersebut juga menunjukkan bahwa penilaian pembangunan berkelanjutan melalui RSDI perlu pengamatan terhadap masing-masing pilar. Melihat PE, PS dan PL, dapat dilihat bahwa perkembangan pembangunan wilayah tidak hanya berkaitan dengan

peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga perubahan pada kesejahteraan sosial dan kondisi lingkungan.

Uji Normalitas Data dan Pemilihan Metode Korelasi

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Shapiro Wilk

Variabel	Observasi	Statistik W	Sig. (Prob>z)	Simpulan
DF	106	0,73355	0,00000	Tidak Normal
RSDI	105	0,92097	0,00001	Tidak Normal
PE	105	0,96446	0,00648	Tidak Normal
PS	105	0,96347	0,00545	Tidak Normal
PL	105	0,94136	0,00016	Tidak Normal

Sumber: Hasil olahan data Stata, 2026

Hasil uji shapiro wilk menunjukkan bahwa data penelitian tidak berdistribusi normal. Analisis hubungan antara desentralisasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan dilakukan menggunakan metode korelasi Rank Spearman. Metode ini digunakan untuk melihat hubungan antara DF dan RSDI maupun pada masing-masing pilar pembangunan berkelanjutan.

Hubungan Desentralisasi Fiskal dengan Pembangunan Berkelanjutan

Tabel 4. Hubungan Desentralisasi Fiskal dengan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2014, 2019, dan 2024.

Hubungan	2014	2019	2024
DF - RSDI	-0,197 (0,269)	-0,301 (0,083)	0,103 (0,536)
DF - PE	-0,126 (0,484)	0,028 (0,871)	0,155 (0,351)
DF - PS	0,139 (0,437)	-0,059 (0,737)	0,181 (0,276)
DF - PL	-0,496 (0,003)**	-0,390 (0,022)*	-0,528 (0,000)***

Sumber: Hasil olahan data Stata, 2026

Keterangan : Angka pertama merupakan koefisien korelasi, angka dalam kurung merupakan *p-value*. * signifikan pada $p < 0,05$, ** signifikan pada $p < 0,01$, *** signifikan pada $p < 0,001$.

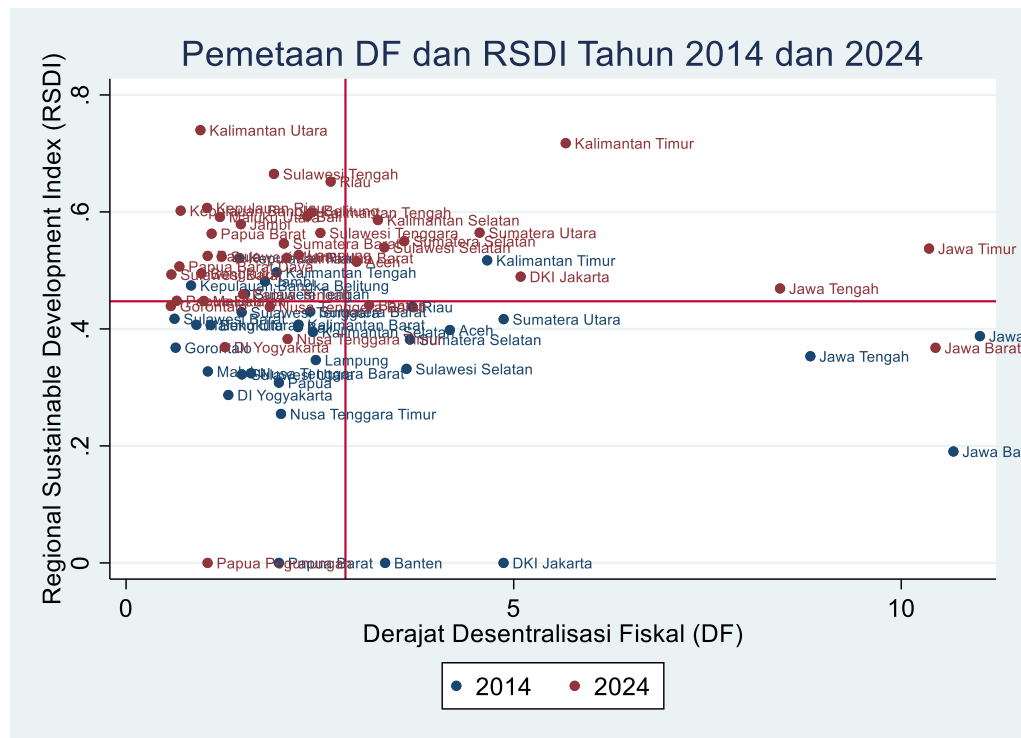
Berdasarkan tabel 4, DF dengan RSDI tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik pada ketiga periode penelitian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan kapasitas fiskal belum memiliki keterkaitan yang konsisten dengan capaian pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Hubungan desentralisasi fiskal dengan pembangunan berkelanjutan menunjukkan pola yang berbeda pada masing-masing dimensi.

Hubungan DF dengan PL memiliki pola yang berbeda, hubungannya menunjukkan arah negatif dan signifikan pada setiap periode penelitian. Sementara itu, hubungan DF dengan PE dan PS tidak menunjukkan signifikansi, temuan ini menunjukkan bahwa keterkaitan DF dengan pembangunan berkelanjutan dalam penelitian ini lebih terlihat pada dimensi lingkungan dibandingkan dengan indeks pembangunan secara agregat maupun pada dimensi ekonomi dan sosial.

Analisis Kuadran Provinsi

Analisis kuadran digunakan untuk memetakan posisi relatif provinsi berdasarkan DF dan RSDI. Batas kuadran menggunakan rata-rata keseluruhan periode penelitian, DF sebesar 2,830 dan RSDI sebesar 0,447. Gambar dibawah ini memperlihatkan perbandingan posisi provinsi pada tahun 2014 dan 2024

Gambar 3. Pemetaan Desentralisasi Fiskal (DF) dan RSDI Tahun 2014 dan 2024



Sumber: Hasil olahan data Stata, 2026

Hasil pemetaan menunjukkan adanya perubahan posisi pembangunan berkelanjutan antarprovinsi. Beberapa provinsi seperti Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Riau memiliki RSDI relatif tinggi pada tahun 2024. Sedangkan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten pada tahun yang sama memiliki nilai DF yang relatif tinggi tetapi RSDI masih dibawah rata-rata. Kondisi ini menunjukkan peningkatan DF tidak selalu diikuti oleh peningkatan RSDI.

Hubungan Desentralisasi Fiskal Sisi Pengeluaran dengan Pilar Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan DF dan PE tidak signifikan pada seluruh periode pengamatan. Dengan nilai DF-PE sebesar -0,126 pada tahun 2014, 0,028 pada tahun 2019, dan -0,120 pada tahun 2024, dengan seluruh p-value lebih besar dari 0,05 atau 5%. perubahan besarnya ruang pengeluaran fiskal belum menunjukkan hubungan yang nyata dengan capaian pilar ekonomi. Arah hubungan juga berubah antarperiode, sehingga belum menunjukkan pola yang konsisten.

Kondisi tersebut dapat berkaitan perbedaan struktur ekonomi dan kapasitas pengelolaan fiskal antardaerah. Besarnya pengeluaran daerah belum tentu diikuti peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja apabila alokasi belanja belum sepenuhnya mendukung pada kegiatan aktivitas ekonomi daerah. Temuan ini sejalan dengan Martinez-Vazquez dan McNab (2003) bahwa hasil desentralisasi fiskal bergantung pada kapasitas dan pengelolaan daerah.

Hubungan Desentralisasi Fiskal Sisi Pengeluaran dengan Pilar Sosial

Hubungan DF dengan Pilar Sosial (PS) juga tidak menunjukkan signifikansi statistik pada seluruh periode. Nilai sebesar 0,139 pada 2014, -0,059 pada 2019, dan 0,152 pada 2024 menunjukkan arah hubungan yang berubah, dengan seluruh p-value lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya ruang pengeluaran fiskal belum memiliki hubungan yang konsisten dengan capaian pembangunan sosial.

Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh perbedaan kondisi sosial, kualitas pelayanan publik, dan pengelolaan anggaran antardaerah. Desentralisasi fiskal memberikan ruang bagi daerah untuk menyesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan masyarakat, tetapi capaian sosial tetap bergantung pada bagaimana anggaran tersebut dikelola dan diarahkan. Hal ini sejalan dengan Sepulveda dan Martinez-Vazquez (2011) bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap indikator sosial tidak seragam antarwilayah.

Hubungan Desentralisasi Fiskal Sisi Pengeluaran dengan Pilar Lingkungan

Berbeda dengan dua pilar sebelumnya, hubungan DF dengan Pilar Lingkungan (PL) menunjukkan arah negatif dan signifikan secara konsisten di setiap periode penelitian. Nilai sebesar -0,496 pada 2014, -0,390 pada 2019, dan -0,518 pada 2024 menunjukkan bahwa provinsi dengan DF yang relatif lebih tinggi cenderung memiliki capaian PL yang lebih rendah. Temuan tersebut dapat berkaitan dengan penggunaan ruang fiskal untuk aktivitas ekonomi dan pembangunan fisik yang berpotensi meningkatkan tekanan terhadap lingkungan apabila tidak disertai pengelolaan lingkungan yang memadai. Kondisi ini sejalan dengan Fauzi dan Oxtavianus (2014) serta Elkington (1997) yang menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hawari et al. (2023) juga menunjukkan bahwa hubungan desentralisasi fiskal dengan kualitas lingkungan dapat berbeda antarwilayah, terutama ketika peningkatan aktivitas ekonomi tidak diimbangi dengan perlindungan lingkungan.

Hubungan Desentralisasi Fiskal Sisi Pengeluaran dengan RSDI

Hubungan DF dengan RSDI tidak menunjukkan signifikansi statistik selama periode pengamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya ruang pengeluaran fiskal belum memiliki hubungan yang cukup kuat dengan capaian pembangunan berkelanjutan secara agregat. Hal tersebut dapat terjadi karena RSDI merupakan indeks komposit yang menggabungkan pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan, sementara hubungan DF dengan masing-masing pilar menunjukkan pola yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan DF dengan pembangunan berkelanjutan tidak bersifat seragam antar dimensi. Besarnya ruang pengeluaran fiskal belum cukup menjelaskan capaian RSDI secara keseluruhan, sedangkan hubungan yang paling konsisten terlihat pada Pilar Lingkungan. Temuan ini menegaskan pentingnya arah dan kualitas penggunaan belanja dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan RSDI dan ketiga pilarnya mengalami peningkatan selama 2014-2024, sedangkan rata-rata Desentralisasi Fiskal (DF) mengalami penurunan pada tahun 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan DF dengan RSDI dan Pilar Ekonomi serta Pilar Sosial tidak signifikan. Sementara itu, DF memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan Pilar Lingkungan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran fiskal daerah belum secara otomatis berkaitan dengan peningkatan capaian pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh. Pembangunan berkelanjutan tetap memerlukan pengelolaan anggaran yang memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai kondisi masing-masing daerah.

Penelitian ini menggunakan data tingkat provinsi pada tahun 2014, 2019, dan 2024, sehingga belum menggambarkan kondisi pada tingkat kota/kabupaten dan perubahan tahunan secara lebih rinci. Selain itu, pengukuran pembangunan berkelanjutan menggunakan indikator yang tersedia dalam pembentukan RSDI, sehingga masih terdapat kemungkinan aspek lain yang belum tercakup. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang, unit analisis yang lebih rinci, serta menambahkan indikator lain yang relevan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara lebih seimbang.

DAFTAR RUJUKAN

- Jin H, Tsai FS, Martinez-Vazquez J. *Optimal expenditure decentralization for sustainable development: evidence from a 52-country panel analysis*. *Financ Innov*. 2025;11(1):1–29.
- Hawari A, Alyasa FM, Akbar MR. *Fiscal Decentralization in Indonesia : Does It Curb the Quality of Environment ?* 2024;8(1).
- Hong T, Nguyen H, Cao TH, Nguyen TN. *International Journal of Sustainable Development and Planning Fiscal Decentralization and Sustainable Development Linkage – The Role of Green Innovation*. 2025;20(1):183–93.
- Rahma H, Fauzi A, Juanda B, Widjojanto B. *Development of a Composite Measure of Regional Sustainable Development in Indonesia*. 2019;1–16.
- Fauzi A, Oxtavianus A. *The Measurement of Sustainable Development in Indonesia Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. 2014;15.
- Barbier EB, Burgess JC. *The Sustainable Development Goals and the systems approach to sustainability*. 2017;11:1–22.
- Gro Harlem Brundtland. *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*. 1984.
- Guo S, Wen L, Wu Y, Yue X, Fan G. *Fiscal Decentralization and Local Environmental Pollution in China*.
- Cassen RH. *Our common future: report of the World Commission on Environment and Development*. Vol. 64, International Affairs. 1987. 126–126
- Statistik BP. Badan Pusat Statistik. 2025. Persentase Penduduk Miskin (Po) Menurut Provinsi dan Daerah.
- Statistik BP. BPS - *Statistics Indonesia*. 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi.
- Kementrian K. Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2022. p. 2003–5 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- KLH. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2014 Jakarta 2015.
- Joanne C, Barbier EB, Burgess JC. *The Sustainable Development Goals and the systems*

- approach to sustainability The Sustainable Development Goals and the systems approach to sustainability. 2017;0–24.
- Martinez-vazquez J, McNab RM. *Fiscal Decentralization and Economic Growth*. 2003;31(9):1597–616.
- Sepulveda CF, Martinez-vazquez J. *The consequences of fiscal decentralization on poverty and income equality*. 2011;29.
- John Elkington. *Cannibals With Forks- The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. 1997.
- Fiscal federalism* : Oates, Wallace E
- Role T, Decentralization F, Local S, Development E. The Role of Fiscal Decentralization in Sustainable Local Economic*. 2024;(1):27–40.
- BPS Indonesia. Badan Pusat Statistik. 2023. Gini ratio menurut provinsi dan daerah.
- Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. 2023. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (miliar rupiah), 2022.